

Peksos

Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial

- ▶ IMPLEMENTASI TEKNIK KONTROL DIRI DAN TEKNIK SELF-MANAGEMENT DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL BAGI KLIEN "DIT" PENYALAHGUNA NAPZA DI YAYASAN GRAPEKS BANDUNG

Windi Sihombing

Halaman 1-15

- ▶ PENERAPAN CLIENT CENTERED THERAPY TERHADAP KLIEN "KK" YANG MENGALAMI GRIEVING DI SEKOLAH LAMAR RASA NEGERI A KOTA BANDUNG

Mulyadi

Halaman 16-26

- ▶ PEMANFAATAN ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT BAGI DISABILITAS

Rosyikin Sekanda

Halaman 27-34

- ▶ PENERAPAN RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY PADA "HS" (STUDI KASUS EKS-PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENGALAMI AGRESIVITAS DI KELURAHAN CIBURELIN KECAMATAN CIMAH BANDUNG)

Aamini

Halaman 45-57

- ▶ IMPLEMENTASI TERAPI KELUARGA STRATEGIS PADA KELUARGA DENGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN WURUM DI DESA SUKAMANTI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

Aarti Sasi Mulyati

Halaman 58-77

- ▶ DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT

Yana Sundayani

Halaman 78-97

- ▶ PENGEMBANGAN MODEL COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY DALAM MENGGASAL PENYAKIT AGRESIF PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI PANTI SOSIAL BINA NETRA WYATA GUNA BANDUNG

Rizka Try Sakti

Halaman 98-111

- ▶ STRATEGI BERTAHAN HIDUP KOMUNITAS MISKIN DI KAMPUNG KRAMAT SENEN JAKARTA PUSAT

Bambang Rudianto

Halaman 112-125

- ▶ PENERAPAN FAMILY THERAPY DAN LOGO THERAPY TERHADAP SELF ESTEEM PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DI DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CIBUNYU KABUPATEN BANDUNG

Mazlilian Roberth Nattu

Halaman 126-138

- ▶ PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR MELALUI KELOMPOK KAMPUNG SIAGA BENCANA DI KAMPUNG CIBUNTU KELURAHAN CIBELUNYING KABUPATEN BANDUNG

Amran dan Nurjanah

Halaman 139-153

Peksos

Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial

PENGARAH

Dr. Dwi Heru Sukoco, M.Si.
(Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung)

PEMIMPIN REDAKSI

A. Nelson Arifonang, Ph.D.
(Pembantu Ketua Bidang Akademik – STKS Bandung)

MITRA BEBESTARI

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksono, M.Sc.
(Universitas Indonesia)

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Prof. Madya Dr. Azlinda Azma

(Universiti Sains Malaysia)

Prof. Madya Dr. Ismail Baba

(Universiti Sains Malaysia)

DEWAN EDITOR

Dr. R. Enkeu Agiati, M.Si.

Dr. Didiet Widlowati, M.Si.

Dr. Aep Rusmana, M.Si.

Dr. Bambang Rustanto, M.Hum.

Dr. Sakroni

Suharna, Ph.D.

SEKRETARIAT

Drs. Sabar Riyadi, M.Si.

Caca Suryana, S.Sos.

Dayat Sutiana, AKS, MPS.Sp.

Drs. Dinarmaya

LAYOUT EDITOR

Mika Oberijn Slagjan

ADMINISTRASIT EDITOR

Bayu Aji, S.T

Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial adalah jurnal ilmiah artikel dan hasil penelitian pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial. Untuk menunjang kelangsungan eksistensi Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Peksos, redaksi mengundang para penulis dan peneliti untuk menyumbangkan artikel dan hasil penelitian di bidang pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial. Artikel dan hasil penelitian tersebut (1) berstat orisinal berupa ide/gagasan maupun hasil penelitian perorangan/kelompok yang belum atau tidak akan dipublikasikan; (2) Naskah diketik 1 sisi menggunakan MsWord, font Arial 10 atau Times New Roman 11; (3) Jumlah halaman naskah 20-30 halaman, menggunakan kertas HVS ukuran A4, dengan menyertakan softcopy beserta biodata penulis; (4) Naskah/Artikel tulisan ilmiah disajikan dengan sistematika Judul, Abstrak (berbahasa Inggris untuk naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya), Pendahuluan, Isi/Tulisan Ilmiah (Pembahasan), Kesimpulan, dan Daftar Pustaka; (5) Naskah hasil penelitian, disajikan dengan sistematika: Judul, Abstrak (berbahasa Inggris untuk naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya), Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.

*Dilarang mengutip, menerjemahkan
atau memperbanyak,
kecuali dengan ijin dari redaksi.*



JURNAL ILMIAH PEKERJAAN SOSIAL
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
(STKS) Bandung
Jl. Dr. H. Juanda No. 367 Bandung 40135
Telp. 022-2504838 Fax. 022-2502962

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

STRATEGI BERTAHAN HIDUP KOMUNITAS MISKIN DI KAMPUNG KRAMAT SENEN JAKARTA PUSAT

Bambang Rustanto

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
rustanto_bambang@yahoo.com

Abstract

The background of this research is the fact of life of poor communities in urban areas should be supported by the carrying capacity of the environment. The Population density and settlements can reduce the ability of the environment to grow well. To maintain the life of poor communities required maintenance of village environment. Socio-liabilities community is measured by peace and social cohesion of the daily life of its citizens. This research uses qualitative research methods with fenomenologis study models to see specific picture of social change in poor communities in urban areas. While the data collection tools by using in depth interviews with the support of participant observation and documentation study. Informants involved, among others, the local organization committee, local government officials such as RT/RW, as well as community leaders and other supporters informants from poor communities themselves. The results of this research found that differences in ethnic and regional origins does not cause difficulty in tolerating but trouble occurs in the event of differences of religion and belief. The social life of the community can be distracted and not run stable if one member or several people perform actions that asocial with troublemakers in the village. This is due to social phobia in the community from one group to another group. The conclusion of this research that there is the role of leaders and informal leaders or formal leaders as controlling social life of its citizens, has a duty to maintain social harmony or Latent Maintenance of this, so that the community was able to sustain life even in conditions of poverty and live in slums.

Key words: poor communities, urban poverty and social work

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah kehidupan komunitas miskin perkotaan yang harus ditunjang dengan daya dukung lingkungan hidupnya. Kepadatan pendudukan dan permukiman dapat menurunkan kemampuan lingkungan hidup untuk berkembang secara baik. Untuk mempertahankan hidup komunitas miskin diperlukan pemeliharaan lingkungan kampungnya. Sosialabilitas komunitas diukur oleh kedamaian dan kerukunan sosial dari kehidupan sehari-hari warganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi fenomenologis untuk melihat secara khusus gambaran perubahan sosial pada komunitas miskin di perkotaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan didukung oleh obeservasi partisipasi dan studi dokumentasi sedangkan informan terdiri dari warga setempat, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan pengurus organisasi sosial lainnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbedaan suku dan asal daerah tidak menimbulkan kesulitan dalam bertoleransi tetapi kesulitan terjadi apabila terjadi perbedaan agama dan keyakinan. Kehidupan sosial komunitas dapat terganggu dan tidak berjalan baik apabila salah satu anggota atau beberapa orang melakukan tindakan yang asosial dengan membuat keonaran dalam kampung. Hal ini disebabkan adanya *social phobia* dalam komunitas dari golongan satu terhadap golongan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran para tokoh dan pemimpin informal maupun formal selaku pengendali kehidupan sosial warganya, mempunyai tugas untuk menjaga kerukunan sosial atau *latent*

maintanance ini, sehingga komunitas itu mampu mempertahankan kehidupannya meskipun dalam kondisi kemiskinan dan tinggal di daerah kumuh.

Kata kunci: komunitas miskin, kemiskinan kota dan Pekerjaan Sosial

Pendahuluan

Kemiskinan perkotaan dan/ bersama penduduknya, dapat dilihat sebagai pasangan yang tak terpisahkan dalam pertumbuhan Kota Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara dan Selatan. Setiap saat penduduknya semakin bertambah, karena adanya komunitas *commuter* dari wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi (*Botabek*) dan *urbanisasi* dari wilayah pedesaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Karena Kota Jakarta memberikan keuntungan dari kemewahan, kesempatan kerja, aksesibilitas informasi, dan fasilitas publik yang memadai dari pada wilayah lainnya.

Di sisi lain lingkungan Kota Jakarta menciptakan kompetisi antar warga dimana ada sebagian warga yang menjadi pemenang (*winners people*) dan ada yang tersingkirkan (*loser people*). Mereka yang tersingkirkan tersebut, selalu berkata "kami kehilangan kesempatan kerja, kepemilikan rumah, dan menghadapi setumpuk masalah kemiskinan di kota lainnya". (Bambang Rustanto, 2002). Kemiskinan perkotaan sebagai masalah yang multidimensi menurut Nadvi and Barrientos (dalam Suparlan 2004) sebagai berikut: *Urban poverty is also increasingly acknowledged as a multi-dimensional problem that involves more than deprivation of incomes, but also lack of freedom, increased vulnerability, risk and powerlessness.*

Kemiskinan juga semakin diakui sebagai masalah multidimensi yang melibatkan lebih dari sekedar perampasan pendapatan, tetapi juga kurangnya kebebasan, meningkatnya kerentanan, risiko dan ketidakberdayaan. Menurut Suparlan (2004) bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan

kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut. Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi masyarakat desa ke kota yang tinggi, dan terutama kondisi kehidupan yang miskin (rumah di perkampungan miskin dan kotor, serta perkampungan dengan sedikit pelayanan sosial) upah rendah dan tidak mencukupinya peraturan dalam sektor tenaga kerja formal, serta sulitnya keuangan di sektor tenaga kerja informal. Meskipun riset menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kota biasanya lebih besar dibandingkan penduduk desa, dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, disamping kondisi kehidupan yang lemah, kondisi tersebut memiliki manfaat dimana masyarakat kota berusaha meningkatkan kondisi kehidupannya, melalui pendidikan anak-anaknya serta penggunaan pendapatan dengan hati-hati / hemat.

Pertanyaan tentang kemiskinan perkotaan yang terlontar berkaitan dengan kerja, rumah, dan lingkungan tersebut merupakan pertanyaan tentang *survival of life* (bertahan hidup). Kekalahan sebagian warga kota dalam memperebutkan Kota Jakarta, menyebabkan mereka melarikan diri dari kehidupan mewah Kota Jakarta kepada kehidupan gelap Kota Jakarta yaitu kantong-kantong kemiskinan (*pockets of poverty*). Inilah yang menyebabkan Kota Jakarta saat ini memiliki kurang lebih 3.000 kantong kampung miskin yang didiami tidak kurang dari 3 juta jiwa, ini berarti hampir 1 per 3 wilayah kota Jakarta merupakan wilayah yang didiami oleh warga miskin yang tersingkir (Bambang Rustanto, 2002). Kondisi lingkungan hidup mereka dibawah standar hidup minimum, dimana tidak tersedia secara memadai fasilitas dasar permukiman seperti air bersih, jalan, sanitasi, fasilitas sosial umum (fasos/fasum), dan transportasi serta lainnya.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila mendengar wabah penyakit muntaber, demam berdarah, cacangan, infeksi saluran napas akut (ISPA), sakit kulit, dan lainnya yang disebabkan karena lingkungan yang buruk. Keterbatasan fasilitas sosial umum yang dapat digunakan warga menyebabkan terjadinya tawuran warga terutama di Kampung Kramat Sener Jakarta Pusat. Hampir setiap saat kita dikejutkan oleh musibah kebakaran yang dikarenakan rapatnya rumah dan ketidakteraturan jaringan listrik. Belum lagi masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya yang memampuk dari hari ke hari.

Robert Chambers (dalam Setiadi, 2011) membeberkan masalah kemiskinan perkotaan sebenarnya terletak pada perangkap kemiskinan yang terdiri atas 5 unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan, yang sering terkait antara satu sama lain, sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga. Menurut analisis Chambers kerentanan dan ketidakberdayaan merupakan masalah pokok yang harus menjadi perhatian utama dimana ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat, seperti datangnya bencana, kegagalan, atau penyakit yang datang tiba-tiba, dan musibah kecelakaan yang menimpa keluarga miskin ini. Kerentanan ini sering kali menimbulkan roda penggerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda atau aset produksinya sehingga mereka makin miskin dan makin tidak berdaya. Situasi kemiskinan di kota yang terlalu lama dialami oleh suatu kelompok dalam masyarakat akan membentuk suatu budaya kemiskinan sebagai suatu subdaya yang membentuk sikap dan perilakunya.

Kemiskinan telah membentuk suatu siklus/lingkaran setan yang menghambat keluarga miskin keluar dari kemiskinannya selain disebabkan oleh kemiskinan ekonomi juga

karena kurangnya dalam hubungan sosial dan pergaulannya terbatas dengan teman se nasib.

Berkaitan dengan kemiskinan budaya sebagaimana dikemukakan oleh Norton dan Hunt (dalam Astrid Susanto, 2008) membagi komunitas miskin perkotaan kedalam 3 kelompok besar berdasarkan sikap sosialnya terhadap kemungkinan memperbaiki nasib diri yaitu: a) Kelompok atas yang tidak/kurang ada perhatian untuk naik lebih tinggi dalam tangga sosial, mengingat bahwa hal tersebut telah mereka capai. Bagi kelompok ini masalah prestasi menjadi masalah yang dinormordukan, b) Kelompok yang masih mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf dan tingkat sosialnya walaupun tidak tergolong kedalam golongan yang miskin/termiskin. Kelompok ini dikelompokkan sebagai kelompok menengah karena masih mempunyai cita-cita lebih lanjut untuk "naik tangga sosial" lebih tinggi lagi. Bagi kelompok ini berlaku nilai "*deferred gratification*", c) Kelompok yang karena tercekam oleh kemiskinan mempunyai nilai untuk mengutamakan hasil dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pandangan menuju kehari di masa mendatang.

Selama krisis ekonomi, fakta menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kota Jakarta menghadapi masalah dari hari ke hari untuk bertahan hidup. Kondisi kehidupan mereka menjadi tidak stabil, dimana mereka mendapatkan penghasilan yang rendah, harga kebutuhan hidup yang meningkat, fluktuasi situasi ekonomi dan politik serta penurunan infrastruktur sosial dalam masyarakat. Selama krisis ekonomi, masyarakat miskin juga merasakan kehilangan aset dasar yang mereka miliki, dan ini dapat berlangsung secara terus menerus yang menyebabkan mereka mengalami ketidakpastian. Suatu studi di Jakarta, dilakukan oleh Bambang Rustanto (2002) tentang kondisi masyarakat miskin perkotaan selama krisis ekonomi, menemukan bahwa peningkatan ketidakpastian pada masyarakat miskin disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, penurunan upah, peningkatan kriminalitas, konflik sosial,

penurunan aksesibilitas terhadap infrastruktur sosial dan ekonomi serta ketidakpastian pelaksanaan tanggung jawab dan partisipasi sosial dari warga masyarakat. Situasi tersebut mendorong lembaga masyarakat untuk melakukan penanganan yang dapat membantu masyarakat miskin di Kota Jakarta meningkatkan kemampuan untuk mengembalikan asset dasar mereka. Mereka juga dibantu dalam memperbaiki kemampuan daya tahan hidup dari tekanan krisis ekonomi. Pengertian riil dari pemberdayaan bagi masyarakat miskin di Jakarta, diarahkan untuk membantu mereka mempunyai kemampuan yang dapat mendorong tumbuhnya modal sosial (*social capital*) dan modal manusia (*human capital*) yang ditujukan untuk peningkatan aktivitas masyarakat.

Strategi hidup orang miskin dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri pribadi orang miskin dikarenakan kondisi fisik dan psikologisnya yang lemah, faktor sosial dikarenakan adanya diskriminasi dari lingkungan sosial yang memaksa si miskin tetap miskin dan mewariskan kemiskinannya kepada generasi penerusnya, faktor kultural dikarenakan pola hidup yang menunjukkan sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan tidak memiliki etos kerja, serta faktor struktural yang disebabkan sistem kapitalisme yang telah menyebabkan orang miskin terjatuh dalam kemiskinannya ditengah hegemoni orang kaya dan pemilik modal. Strategi hidup orang miskin dapat saling mempengaruhi dan memiliki kaitan yang sangat erat antara faktor internal dan eksternal, sehingga upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang bersifat memberdayakan orang miskin harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang pro orang miskin dan anti kemiskinan. Upaya-upaya perubahan sikap mental budaya orang miskin menjadi lebih baik dapat dilakukan melalui kegiatan organisasi lokal yang terintegrasi dengan pengorganisasian masyarakat sehingga orang miskin mampu meningkatkan partisipasi dan keberfungsian sosialnya (Wisner Susan, 2002)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemiskinan perkotaan, sebenarnya dapat belajar dari kota-kota besar lainnya di Asia, sebagai contoh kota yang sama besarnya dengan Jakarta yaitu Mumbai (Bombai) di Negara Bagian Mahastara India. Disana pemerintah kota besar (*metropol*) atau provinsi untuk Jakarta, menyerahkan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah kota (*municipal*) atau kotamadya untuk Jakarta dan pemerintah kota menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah lokal (*ward*) atau kelurahan untuk Jakarta. Di setiap kelurahan tersebut, pemerintah lokal bekerja bersama dengan lembaga yang disebut *community development agency (CDA)* dan mereka mempunyai kantor sendiri yang disebut *community development resource centre (CDRC)*. Pelaksanaan pemerintah lokal atau kelurahan tidak diselenggarakan sendiri oleh pemerintah tetapi bekerja bersama para pihak (*stake holder*) dalam masyarakat yang terdiri dari *LSM, Swasta, dan Wakil Masyarakat*. Sebenarnya pemerintah provinsi Jakarta, tidak perlu banyak melakukan perubahan kelembagaan partisipasi di tingkat lokal. Pemerintah provinsi hanya tinggal meningkatkan kapasitas *Dewan Kelurahan* dan memberi kewenangan yang lebih luas *Dewan Kelurahan* sebagai *lembaga legislatif lokal*. Sejalan dengan itu pemerintah provinsi lebih banyak menyerahkan kewenangannya pada pemerintah kelurahan sebagai pemerintah lokal yang lebih kuat, maka pemerintah lokal (*local government*). Dengan pembentukan pemerintah lokal yang lebih kuat, maka pemerintah provinsi Jakarta akan mendekatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada warga kota. Pelayanan dan pembangunan yang dekat dengan warga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah lokal yang kuat juga harus didukung dengan *lembaga legislatif lokal* yang kuat yang dilakukan oleh *Dewan Kelurahan*. Kedua komponen yaitu pemerintahan lokal atau kelurahan dan lembaga legislatif atau *Dewan Kelurahan* yang kuat, akan lebih sempurna lagi.

pendatang dan pekerja musiman) ini menjadi penduduk menetap dan bertahan dalam kemiskinan di kampung ini. Seperti yang dikatakan Ibu Ho berikut ini: *"Dulunya kite-kite ni (orang betawi) yang menguasai wilayah ini. Tapi kemudian banyak pendatang dari Sunda dan Jawa kesini yang kerja sebagai kuli bangunan untuk membangun Senayan, Sarinah, Monas, dan lainnya"*.

Pada awal Orde Baru tahun 1970, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata lingkungan pemukiman yang kurang teratur dan kumuh dengan proyek perbaikan kampung atau yang dikenal dengan nama Proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT). Proyek ini menata lingkungan rumah-rumah, jalan-jalan setapak, saluran air bersih, saluran sanitasi air kotor, taman-taman, kantor Rukun Warga (RW) dan kantor kelurahan. Selain Proyek MHT, pada saat yang sama, Gubernur Ali Sadikin melanjutkan gagasan Presiden Soekarno membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta yang terpusat pada 7 (tujuh) pasar utama yaitu: Pasar Glodok, Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, Pasar Rumpit, Pasar Blok M, Pasar Jembatan Lima dan Pasar Senen. Pembangunan pusat pertumbuhan itu menjadikan salah satu daya tarik Jakarta bagi pendatang dan pencari kerja semakin kuat. Kondisi ini menyebabkan sekitar Kampung Kramat Senen dan termasuk di dalamnya RW ini berdirilah hotel-hotel dan penginapan, juga tempat-tempat kamar sewaan. Dengan demikian wilayah tersebut semakin menjadi padat penghuninya. Lingkungan ini, semakin lebih padat lagi setelah pemukiman liar di Planet Senen (nama suatu area dekat Stasiun Kereta Api Senen) yang dihuni oleh para tunawisma, tuna sosial, gelandangan, dan pengemis dibongkar.

Area Planet Senen ini kemudian hari dijadikan tempat hiburan, ruang terbuka, dan gelanggang olah raga. Banyak para penghuni tersebut melarikan diri dan bermukim dengan membangun gubuk-gubuk liar di kanan-kiri jalur rel Kereta Api dengan sebutan Kampung Kabelan di sekitar ini. Seperti yang dikatakan Pak RW berikut ini: *"Sejak Planet Senen*

dibongkar, banyak tu gelandangan pada diusir dan bikin bedeng-bedeng di pinggir rel, terus diusir sama P.JKA dan pindah tu di lingkungan kite. Jadi padat deh".

Selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 sampai tahun 1999, banyak para pekerja dan penduduk setempat yang sudah menatap kehilangan pekerjaan. Kemudian mereka beralih fungsi bidang pekerjaannya dari pekerja gaji di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Pasar Senen, sekarang menjadi pedagang kaki-lima dan bahkan menjual berbagai jenis jasa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupannya. Banyak juga diantara warga yang menyewakan sebagian rumahnya kepada para pendatang sebagai upaya menambah biaya kehidupan. Selain itu kemampuan warga dan pemerintah untuk merawat rumah dan pemukiman semakin menurun menyebabkan banyak rumah yang rusak dan fasilitas lingkungan tidak terpelihara. Hal ini menambah suasana kampung menjadi semakin kumuh, serta tidak terawat. Seperti yang dikatakan Pak Rukun Tetangga (RT) berikut ini: *"Banyak tu warga kite nyang nganggur setelah krismon, trust ude pade jualan dan servis-servis. Semua usaha dilakuin tuk nambah-nambah dapur ngebul termasuk nyewaan kamar buat anak kost-kosan"*.

Pertumbuhan Organisasi Komunitas

Sebelum krisis ekonomi, telah ada organisasi sosial dan pada umumnya adalah organisasi sosial yang berafiliasi dengan program pemerintah seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan lainnya. Setelah krisis ekonomi, kemudian banyak muncul organisasi sosial milik warga masyarakat seperti majelis taklim, kumpulan pengajian, rukun kematian, jimpitan, dan lainnya. Banyak juga organisasi yang dibentuk pihak LSM, seperti yang dikatakan Ibu Mar berikut ini: *"Yang hadir dalam pertemuan malam ini selain Pak RW, RT, dan pengurus PKK, Posyandu, Karang Taruna, juga ada Majelis Taklim, Rukun Kematian, ada remaja RISMA, ada PAUD,*

juga ada Wahana Bina Wanita, Koperasi, dan perkampungan lainnya. Data organisasi ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu seperti dalam daftar hadir yang 30 orang tersebut tadi. Yang hadir saat ini bukan seluruh anggotanya, namun pada umumnya organisasi ini divakili pengurusnya terutama di RW”.

Tumbuh suburnya organisasi sosial di RW ini setelah krisis ekonomi, didorong oleh kesulitan bersama yang dirasakan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain aspek ekonomi juga ada dorongan dari aspek sosial dan budaya, yang menyebabkan banyak warga baik bapak-bapak maupun ibu-ibu di RW ini masuk organisasi sosial. Adanya alasan untuk melarikan diri dari kesulitan hidup dan keruwetan keluarga dan mencegah timbulnya stress, disamping itu juga alasan untuk mendapatkan pengalaman baru dan menambah ilmu pengetahuan serta keterampilan baru. Seperti dikatakan Ibu Mae berikut ini: *”Ikut kegiatan organisasi untuk menghilangkan stress, kan ibu-ibu di rumah ribet, suka nyanyi. Minggu ini ikut PKK minggu depan ikut wahana, minggu depan ikut pengajian. Disini dapat pelajaran ini disana dapat ilmu ini, keterampilan ini itu dan nanti kite-kite trapkan tu di rumah masing-masing”.*

Keikutsertaan dalam organisasi sosial bagi warga masyarakat ini telah mendorong jumlah organisasi sosial semakin bertambah. Sehingga warga masyarakat lebih terbuka dan senang berorganisasi. Padahal situasi ini berbeda sekali dengan kondisi masyarakat sebelum krisis ekonomi. Karena selama Orde Baru pemerintah hanya memperbolehkan berdirinya organisasi sosial yang berafiliasi dengan program pemerintah. Sedangkan organisasi sosial milik masyarakat kurang mendapat dukungan dan pembiayaan dari pemerintah.

Setelah era reformasi dan eforia demokrasi, munculah berbagai bentuk organisasi sosial, menyebabkan satu orang warga boleh mengikuti dua sampai tiga organisasi sosial. Seperti dikatakan Pak Te berikut ini: *”Dulu tiap-tiap warga takut ikut organisasi. Saat ini*

banyak warga ikut organisasi sosial. Saya ikut organisasi sexual Lilahi Taalla. Anggota kita ada 300 orang, dan mereka juga menjadi anggota dari organisasi sosial yang lainnya. Kita-kita ini memang senang dengan kegiatan yang berbau sosial, sehingga kita dapat kenal sana kenal sini ya untuk silaturahmi. Semua untuk kepentingan kita. Kita ini seperti keluarga besar aja”.

Dukungan Organisasi Komunitas

Tumbuh suburnya organisasi sosial yang ada di lingkungan RW ini memberi manfaat bagi warga masyarakatnya. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sosial pada umumnya memberikan pelayanan sosial dasar yang diperuntukkan bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu mereka yang berada dibawah garis kemiskinan atau penghasilan rata-rata dibawah \$2 atau Rp.20.000,- perhari (Definisi Kemiskinan Bank Dunia). Kegiatan pelayanan sosial dasar ini didasarkan kepada kebutuhan riil masyarakat dengan dukungan sumber daya serta keterampilan yang dimiliki masyarakat itu sendiri atau sering disebut *board based social welfare*. Pelayanan yang diadakan antara lain penyantunan bagi anak yatim, keluarga miskin, sumbangan sosial untuk melahirkan, orang sakit, yang meninggal dunia, dan keluarga yang mengalami musibah atau kesulitan hidup bahkan semakin berkembang kepada kebutuhan ekonomi lainnya seperti pemberian modal usaha. Seperti yang dikemukakan Ibu Ya berikut ini: *”Organisasi Wahana ini dibentuk oleh pendirinya setelah melihat banyak warga masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Mula-mula kita mengumpulkan sumbangan untuk orang miskin, yang sakit, dan melahirkan terus menyantuni anak yatim dan sekarang udah mampu memberikan pinjaman modal bagi anggotanya”.*

Selain kegiatan organisasi sosial untuk pelayanan sosial dasar, juga ada organisasi sosial untuk penyebaran informasi dan dakwah. Bahkan ada organisasi sosial yang bergerak dalam memberikan kesadaran

warganya dalam melaksanakan hidup dan berelasi sosial secara baik. Hal ini dilakukan oleh organisasi sosial yang ada untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang majemuk dan berasal dari berbagai macam budaya dan latar belakang. Namun ada juga organisasi sosial yang meningkatkan kohesivitas para anggotanya karena adanya ikatan primordialisme yang mendasari keberadaan organisasi sosial tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Pak To berikut ini: *"Ada kegiatan saya menyampaikan dakwah secara ikhlas. Kegiatan saya tanpa dibiayai dan semua dari diri sendiri. Organisasi sosial ini untuk gerakan sosial kemasyarakatan dimana kita ada yang ada makanan kita bawa sendiri, membantu masyarakat yang kekurangan bahkan ada nyang stress. Banyak orang yang kenal dan untuk memperpanjang silaturahmi. Kita menjalankan perintah Allah"*.

Kepercayaan Organisasi Komunitas

Organisasi sosial yang diikuti warga masyarakat baik yang berafiliasi dengan program pemerintah, milik masyarakat, maupun bentuk lain LSM di RW ini dapat beroperasi selama bertahun-tahun. Salah satu ukuran keberhasilan organisasi sosial ini terkait dengan kekompakan anggotanya. Karena para anggotanya merasa mendapat keuntungan material maupun non material. Disamping itu kekompakan ini juga didukung oleh relasi sosial yang intim dari para anggotanya. Dimana satu anggota dengan anggota lainnya, satu dengan yang lainnya saling kenal dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing orang mengetahui perilaku anggotanya. Namun ada juga beberapa anggota yang menganggap perilaku anggota lainnya sebagai tanggung jawab masing-masing. Semuanya ini merupakan bentuk demokrasi *face to face* yang mendukung keberadaan organisasi dan pengembangan kapasitas anggotanya terutama para pengurus. Seperti yang dikatakan Ibu Na berikut ini: *"Yang cakar-cakar dalam organisasi ngak ada, tapi yang ngrumpul ada. Jangan munalah (munafik), yang penting jangan ngadu domba. Paling ngomong tentang anak-anak. Dan*

kita ngak mikiran urusan orang lain. Kita ini perilakunya nafsi-nafsi aja (urusan masing-masing). Tapi urusan organisasi kita majukan bersama".

Topik paling penting dan hangat untuk dibicarakan dalam organisasi sosial terkait dengan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan organisasi. Organisasi sosial dalam masyarakat di RW ini seluruh kegiatan dan operasionalnya dibiayai sendiri oleh para anggotanya. Sehingga pengawasan keuangan, selain dilakukan oleh antar pengurus juga secara langsung dilakukan oleh anggota. Setiap periode para pelaksana kegiatan selalu melaporkan kegiatan dan keuangan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan ini diumumkan secara langsung maupun tidak langsung baik secara tertulis maupun lisan. Akuntabilitas dalam organisasi sosial komunitas ini lebih transparan/terbuka, karena setiap kegiatan dilakukan secara *ad hoc* atau dalam bentuk kepanitiaan. Biasanya pengurus atau para pelaksana yang melakukan kecurangan akan segera ditegur bahkan diganti oleh anggotanya. Karena jumlah uang yang ada sebagian besar diperoleh dan berasal dari anggota. Seperti yang dikatakan Ibu Ya berikut ini: *"Keuangan kan ada laporannya, kan ada bendahara. Disini ada KPK-nya tu-tu dia orangnya (sambil menunjuk seseorang) yang terus-terusan ngawasi keuangan kita-kita (organisasi). Disini kalau ada yang jelek dan bagus kelihatan. Kalau pertanggungjawabannya bagus kepake terus. Tergantung anggota dan masyarakatnya yang nilai. Udah jadi resiko pengurus yang berlaku curang pasti dikritik atau diganti. Kebanyakan cuma kritik kaya petasan aja ya dar dor kesana-kesini. Lebih bagus negor langsung lewat pengurus, kan nanti kita-kita bisa ngejelasin"*

Kerjasama Organisasi Komunitas

Sumber daya yang dimiliki masing-masing organisasi sosial ini ruang lingkupnya kecil dan sangat terbatas. Dibalik itu permasalahan sosial yang harus dipecahkan dalam masyarakat cukup banyak dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial semakin

meningkat. Untuk mengatasi masalah sosial masyarakat tersebut, maka beberapa organisasi sosial saling bekerja sama membuat kegiatan atau program untuk memecahkan masalah yang ada. Melalui kerja sama ini, masalah yang berat dapat menjadi ringan, bahkan dengan kebersamaan ini masing-masing organisasi akan memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk kerjasama ini ada yang bersifat insidental namun ada juga yang bersifat permanen tergantung masalah sosial dan kebutuhan masyarakat yang ditangani. Ada organisasi sosial yang memberikan dukungan secara material dan ada juga yang memberikan dukungan non material tergantung dari kemampuan masing-masing organisasi tersebut. Seperti yang dikemukakan Ibu Na berikut ini: *"Contohnya tu seperti waktu hari raya anak yatim atau sumatan masal. Dari sekarang masing-masing organisasi pada anjakan-ancangan (perencanaan bersama). Dari kelompok ini ngirim tenaga 10 orang dari pengajian sana 10 orang dan dari PKK bantuan uang sekian ribu. Nanti dari Wahana nyumbang apa lagi nyang die miliki. Semua ngak ada perintah tapi udah pada nauin sendiri-sendiri. Ada juga yang nyariin penceramah, ada nyang nyariin tenda, kursi, bahkan konsumsi dan macam-macam kebutuhan gitu. Bahkan kalau perlu kita carikan donator dari rumah ke rumah"*.

Kegiatan bersama antar organisasi ini, juga dilakukan untuk keperluan gotong-royong yaitu kegiatan bersama untuk kepentingan umum yang mencakup seluruh aktivitas masyarakat. Kegiatan gotong-royong yang digerakkan oleh seluruh organisasi sosial komunitas ini dilakukan untuk pemeliharaan lingkungan seperti kebersihan, keamanan, dan kesehatan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan gotong-royong ini biasanya dilakukan pada waktu libur atau dicari waktu yang dapat menggerakkan seluruh potensi warga masyarakat. Gotong-royong ini sebenarnya tradisi masyarakat desa tetapi karena masyarakat kota pada umumnya para pendatang, mereka juga membawa budaya desanya ke kota. Keberadaan budaya gotong royong ini sudah menjadi kebiasaan bagi

masyarakat kota termasuk di RW ini. Gotong-royong diadakan karena kehidupan yang sulit membutuhkan kerja sama dan kerja sama ini sebagai bentuk solidaritas kolektif. Warga yang tidak terlibat dalam kegiatan gotong-royong sering mendapat sanksi sosial dari warga lainnya bahkan tidak mendapat dukungan sosial dari organisasi sosial yang ada. Seperti yang dikatakan Pak Ah berikut ini: *"Kalau ada kebakaran, kena musibah, bersihin got, simkamling, kita kerja kolektif gitu ya namanya kerja bakti biasalah gotong royong gitu. Kalau kebersihan dan simkamling itu udah kerjaan rutin, kita buat giliran, kita sult minggu ini gang ini, minggu depan gang itu. Kalau ada nyang ngak mau ikut, kita tegur kalau juga ngak ngerti nanti kalau ada apa-apa kita diem aja, kalau dia pendatang kita usir tu dia pulang kampung sana, epp (emang gue pikirin)"*.

Informasi Organisasi Komunitas

Penyebaran informasi antar organisasi sosial komunitas ini merupakan bagian penting dari sosialibilitas dalam masyarakat kota. Informasi ini dapat berasal dari organisasi itu sendiri untuk para anggotanya. Informasi juga dapat datang dari organisasi satu kepada organisasi lainnya bahkan mungkin datang dari pihak pemerintah maupun LSM. Informasi ini ada yang bersifat penting dan ada yang bersifat biasa, terkadang sudah untuk membedakan antara keduanya.

Penyampaian informasi disalurkan melalui media resmi melalui undangan atau cetakan lainnya maupun informal melalui pengeras suara dari sarana umum. Bahkan informasi juga disampaikan dengan cara mendatangi rumah-rumah dan disampaikan melalui media dari mulut ke mulut (MLM). Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ha berikut ini: *"Kalau ada kegiatan bersama kayak gini. Kita setiap ada pertemuan gini tolong grupnya ada undangan dari kelompok ini dan kasih tau grup nyang lain. Tapi kalau untuk laporan pemerintah seperti rt, rw, lurah, kita pada undangan atau laporan tertulis kan untuk menghormati. Kita sering juga pakai telepon,*

tapi kalau penting kita bisa pakat halo-halo lewat mesjid, halo-halo itu penting. Kadang kadang kita pakai segala cara, bahkan datang juga ke rumah-rumah. Tapi kalau dari kelurahan atau kecamatan kita lewat RW atau RT, kadang juga lewat undangan. Kalau penting juga kita pakai temple-tempel bahkan kita punya madding (majalah dinding) seperti punya RISMA ada”.

Penyebaran informasi ini, selain untuk keperluan organisasi sosial juga untuk keperluan pemberitahuan kepentingan masing-masing individu warga masyarakat itu sendiri. Informasi yang disebarluaskan biasanya tentang berita duka seperti kematian salah seorang anggota keluarganya. Informasi ini menyangkut bagian tanggung jawab sosial antar warga masyarakat dalam kehidupan masyarakat hidup di perkotaan seperti di RW ini. Rasa tanggung jawab sosial antar warga masyarakat ini memang terus dipupuk sebagai bentuk mempertahankan keberadaan masyarakat. Tanpa adanya rasa tanggung jawab sosial ini, maka dapat memunculkan perasaan individualisme. Informasi tentang berita duka kematian ini biasanya dilakukan melalui saluran media informal seperti lewat speaker di masjid-masjid. Seperti yang dikatakan Ibu Id berikut ini: *“Assalamualaikum, dari halo-halo, kita udah siap-siap nih. Berita siapa nyang meninggal ni laki-laki apa perempuan. Kita tunggu-tunggu eh ternyata berita dari posyandu ada penimbangan bayi hari gini. Kalau ada nyang meninggal kita terus sebarkan ke seluruh warga ni di RT sana gang sana ada nyang meninggal. Jadi kita siap-siap untuk membantu keluarganya. Itu udah kewajiban bersama kita, sebagai tetangga kita perlu rukun satu dengan yang lainnya”.*

Toleransi Sosial Komunitas

Kehidupan di kota besar seperti Jakarta, kalau dulu hanya didominasi oleh beberapa suku besar seperti Betawi, Sunda, dan Jawa. Adanya perkembangan jaman, saat ini terdapat pluralitas kehadiran suku-suku lain sebagai pendatang; selain berbeda asal-usul daerah dan

suku, terkadang juga berbeda agama dan kepercayaan. Kesemua perbedaan itu dapat disatukan dengan adanya rasa toleransi dari masyarakat di RW ini. Rasa toleransi antar warga dalam komunitas di RW ini merupakan perwujudan dari lem yang dapat menjadi perekat dalam masyarakat atau *social ties*. Sifat saling menghargai satu dengan yang lainnya ini tidak hanya dalam wujud omongan belaka tetapi juga dalam wujud tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Wa berikut ini: *“Kalau misabnya ada pindahan atau pendatang baru. Mula-mula dia datang ke RT atau RW. Atau kalau sore itu dia memperkenalkan diri dan kalau dia ikut organisasi paling gampang dikenal. Tapi kalau dia diem-diem aja dia ngak akan dikenal. Kalau orang baru itu harus nyang kenal diri jangan menyendiri terus. Nanti kalau ada apa-apa kita kagak dapat bantu tu, salah sendiri dia ngak bermasyarakat. Kita orang RW ini terbuka menerima siapa aja asal die orang baik-baik dan naahin wilayah kite ni”.*

Perbedaan suku dan asal daerah tidak menimbulkan kesulitan dalam bertoleransi tetapi kesulitan terjadi apabila terjadi perbedaan agama dan keyakinan. Hal ini disebabkan adanya *social phobia* dalam masyarakat dari golongan satu terhadap golongan lainnya. Kasus ini menjadi meruncing karena selama orde baru telah terstigma adanya perbedaan sebagai wujud konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Keadaan ini diperparah dengan kejadian konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh, Ambon, Poso, Kalimantan, dan berbagai daerah di Indonesia. Situasi tersebut tidak mempengaruhi kehidupan warga masyarakat di RW ini, karena mereka sudah terbiasa dengan kedatangan orang baru. sebagai konsekuensi wilayah Ibu Kota. Perbedaan agama dan keyakinan sekalipun juga tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat, karena warga lama dan warga baru dapat saling menunjukkan sikap kebersamaan ini. Seperti yang dikemukakan oleh Pak To berikut ini: *“Lain bangsa kalau dia mau akur kita juga akan akur, bahkan ada*

yang berbeda agama meninggal, kita pada ikut datang ke rumah duka. Biar orang Jawa, Sunda, Batak, Islam atau Kristen kalau mau akur kita terima. Nyang penting kita sama-sama anggota masyarakat harus saling menghormati tidak saling menyinggung perasaan. Bahkan kita beda agama sering saling bantu-membantu. Bahkan beda pertaipun kita ngak cekcek tu”.

Strategi Bertahan Hidup

Masyarakat RW ini mempunyai cara-cara yang khas untuk melindungi para anggotanya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang jatuh miskin atau bahkan dibawah garis kemiskinan agar mampu mempertahankan kehidupannya. Kalau keluarga miskin ini dibiarkan tertantar dapat menyebabkan stabilitas sosial dalam masyarakat itu mengalami gangguan. Sehingga kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan normal dan aturan bersama untuk saling menghargai menjadi hilang dan menyebabkan terjadinya kondisi kacau tanpa aturan atau anomie. Berikut ini terdapat beberapa strategi ketahanan hidup komunitas yang dijalankan masyarakat RW ini untuk melindungi bagi para anggotanya yaitu:

a. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu strategi untuk ketahanan hidup komunitas, hal ini dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah sosial busung lapar atau kekurangan gizi. Apabila dalam masyarakat terdapat keluarga atau anggota masyarakat yang kelaparan, maka dengan sendirinya warga lainnya akan memberikan bantuan sebagai wujud kesetiakawanan sosial. Kelompok warga di RW 08 yang sering mengalami masalah kekurangan pangan, pada umumnya adalah kelompok lanjut usia yang tidak memiliki kerabat dekatnya. Seperti yang dikatakan Ibu En berikut ini: *“Kalau ada orang miskin yang tidak mampu makan. Kebanyakan itu hanya orang jompo aja. Setiap hari ada yang ngasih rantang makan untuk orang tua tu. Insidental aja cuma orang-orang yang peduli sama orang miskin.*

Masing-masing individu t yang mau membantu aja dan secara teratur belum ada mau mengorganisir. Tapi selalu ada aja yang memberi bantuan”.

b. Ketahanan Perumahan

Ketahanan hidup komunitas lainnya yang penting adalah perumahan, karena rumah merupakan tempat berlindung manusia dari ganasnya alam terlebih diperkotaan seperti RW ini. Perbaikan rumah dari warga masyarakat yang mengalami musibah atau kerusakan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu biasanya pemerintah menyediakan dana bantuan untuk perbaikan perumahan ini. Namun kadang-kadang turunnya bantuan ini mengikuti alur birokrasi yang lama dan panjang, sehingga masyarakat itu sendiri yang berinisiatif mengadakan perbaikan bagi rumah warga yang rusak. Seperti dikatakan oleh Bapak Im berikut ini: *“Ada rumah yang mau runtuh, kita laporan ke RW dan diteruskan ke Dekel dan nanti ditangani pemerintah kelurahan. Tapi kalau ngak ada tanggapan dari nyang diatas, ya kita-kita turun juga. Kerja bakti lah gotong royong memperbaikinya”*

c. Ketahanan Kerukunan Sosial

Sosialiabilitas masyarakat diukur oleh kedamaian dan kerukunan sosial dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Para tokoh masyarakat dan pemimpin informal maupun formal selaku pengendali kehidupan sosial masyarakat, mempunyai tugas untuk menjaga kerukunan sosial atau *laten maintenance* ini. Kehidupan sosial masyarakat dapat terganggu dan tidak berjalan stabil apabila salah satu anggota atau beberapa orang melakukan tindakan yang asosial dengan membuat keonaran dalam masyarakat.

Gangguan sosial ini dapat datang dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat, dan strategi yang dilakukan antara lain dengan meredam gangguan itu sebelum muncul dan meluas di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Pak RT berikut ini:

"Selaku RT, saya menangani anak nakal, yang kena narkoba tu udah tugas kita. Anak-anak kita arah ke kegiatan positif. Alhamdulillah wilayah kita udah pada bersih. Ngak ada persoalan pertengkaran atau tawuran. Kalau ada apa-apa semuanya kita musyawarahkan sama tokoh-tokoh masyarakat". Dan yang dikatakan Ibu Wi berikut ini: "Ada tu satu rumah anaknya banyak dan orangtuanya pada berantem. Kita dating paling lihat-lihat aja. Ngak pernah ada yang sama pukul-pukulan. Kalau ada yang berantem tetangga sebelah pada datang jadi ngak jadinya mereka ngak berantem lagi tu. Kita saling jaga satu dengan yang lainnya, namanya juga bertetangga".

d. Ketahanan Lingkungan

Kehidupan manusia harus ditunjang dengan daya dukung lingkungan hidupnya. Kepadatan penduduk dan permukiman dapat menurunkan kemampuan lingkungan hidup untuk berkembang secara baik. Untuk mempertahankan hidup manusia diperlukan pemeliharaan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara menanami pekarangan rumah dengan tumbuhan tanaman obat atau tumbuhan hiasan lainnya. Seperti yang dikatakan Ibu Id sebagai berikut: "Kita di rumah masing-masing kita nanem pohon. Itu tergantung niat masing-masing, biar udah dikasih pengarahannya tapi kalau ngak mau pada ngak nanem. Kita juga ikut penataran dari dinas pertanian untuk memperindah lingkungan dengan tanaman obat-obat. Seperti sirih, kunyit, dan lain-lain dirumah kita banyak itu tanaman obat-obatan".

Simpulan

Kehidupan komunitas miskin harus ditunjang dengan daya dukung lingkungan hidupnya. Kepadatan penduduk dan permukiman dapat menurunkan kemampuan lingkungan hidup untuk berkembang secara baik. Untuk mempertahankan hidup komunitas miskin diperlukan pemeliharaan lingkungan hidupnya.

Sosialibilitas komunitas diukur oleh kedamaian dan kerukunan sosial dari kehidupan sehari-hari warganya.

Perbedaan suku dan asal daerah tidak menimbulkan kesulitan dalam bertoleransi tetapi kesulitan terjadi apabila terjadi perbedaan agama dan keyakinan. Kehidupan sosial komunitas dapat terganggu dan tidak berjalan stabil apabila salah satu anggota atau beberapa orang melakukan tindakan yang asosial dengan membuat keonaran dalam kampung. Hal ini disebabkan adanya *social phobia* dalam komunitas dari golongan satu terhadap golongan lainnya.

Disini peran para tokoh dan pemimpin informal maupun formal selaku pengendali kehidupan sosial warganya, mempunyai tugas untuk menjaga kerukunan sosial atau *laten maintenance* ini, sehingga komunitas itu mampu mempertahankan kehidupannya meskipun dalam kondisi kemiskinan dan tinggal di daerah kumuh.

Saran

Komunitas miskin ini mempunyai cara-cara yang khas untuk melindungi para anggotanya. Hal ini dilakukan agar komunitas yang jatuh miskin atau bahkan dibawah garis kemiskinan agar mampu mempertahankan kehidupannya. Kalau keluarga miskin ini dibiarkan terlantar dapat menyebabkan stabilitas sosial dalam komunitas itu mengalami gangguan.

Disarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga kehidupan komunitas dan kampung miskin ini untuk tidak digusur demi perkembangan kota dan kelompok bisnis, agar kehidupan komunitas miskin ini dapat berjalan normal dan sesuai aturan bersama untuk saling menghargai agar tidak menyebabkan terjadinya kondisi kacau tanpa aturan atau anomi.

Daftar Pustaka

Astrid Susanto. 2008. *Kelompok Miskin Perkotaan*. Jakarta: Obor

Bambang Rustanto. 2002. *Model Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Mitra Warga*. Jakarta: YPM Kesuma

..... 2006. *Kesejahteraan Sosial Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Dit PKAT

..... 2014. *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: STKS Bandung

..... 2015. *Penelitian Pekerjaan Sosial Dengan Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

BPS Provinsi Jakarta. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia Jakarta*. Jakarta: BPS

Gueteress Louis. 2000. *Feminism and Social Work*. London: Mac Millan

Patrick Tonys. 2004. *Human Right and Social Work*. London: Mac Millan

Suparlan. 2004. *Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta: Obor

Setiadi. 2011. *Kemiskinan dan Komunitas Miskin*. Jakarta: Obor

Wismer Susan. 2002. *Panduan untuk Fasilitator dalam Pelatihan Jender dan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup

